

MENGGAGAS PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

Oleh

R Wakhid Akhdinirwanto

Kita sudah merdeka 59 tahun lebih. Dalam bidang infrastruktur banyak kemajuan yang dapat dibanggakan. Namun dalam bidang pendidikan dan pembangunan manusia, kita jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Sampai saat ini mayoritas angkatan kerja kita berpendidikan SD dan SLTP, sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia amat renadah.

Berdasar Indikator Pembangunan Manusia yang salah satu ukurannya adalah tingkat pendidikan yang dikembangkan UNDP, data terbaru menempatkan Indonesia berada pada posisi sekitar 40 persen terbawah diantara 174 negara yang dinilai. Rasio untuk pendidikan dasar mencapai 97 persen dan rasio untuk pendidikan menengah 62 persen. Namun hanya setengah dari anak Indonesia menyelesaikan sekolahnya. Sekitar 18 persen anak putus sekolah dasar dan sisanya membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Malaysia ada pada kisaran 40 persen teratas, sementara Singapura ada pada kisaran 15 persen teratas. Dari indikator ini kita harus bekerja keras agar dapat mengejar ketinggalan dengan negara tetangga agar dapat bersaing di era globalisasi ini. Caranya adalah melalui peningkatan mutu dan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan mutu standar minimal dan peningkatan mutu untuk mendapatkan tenaga ahli yang berkualitas. Peningkatan mutu standar minimal dapat dilakukan dengan cara misalnya untuk semua lulusan SLTA harus mampu berbahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris. Sementara peningkatan mutu untuk mendapatkan tenaga ahli berkualitas dilakukan dengan menyediakan sekolah-sekolah bagi pelajar kita yang memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. Sekolah-sekolah semacam SMU/SMA atau MA cocok untuk pelajar semacam ini. Sebab sekolah-sekolah tersebut menurut J Drost merupakan tiruan dari *Gymnasium* dari Jerman atau *Voobereiden Wetenschappelijk Onderweij*s (WVO) di Belanda yang memang dirancang khusus bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi (Kompas, 10 September 2001).

Sedang untuk memperluas akses pendidikan dilakukan dengan dua hal juga yaitu mendapatkan tenaga-tenaga terampil dan membuat standar pendidikan minimal untuk masing-masing satuan pendidikan. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil dapat dilakukan dengan cara membuka sekolah-sekolah semacam SMK di daerah-daerah khususnya daerah-daerah pinggiran. Sebab sebagian besar pelajar kita kurang memiliki minat untuk melanjutkan studi setelah lulus SLTA karena faktor biaya. Karena itu SMK-SMK sangat diperlukan untuk mendidik anak-anak kita sehingga setelah lulus SLTA mereka bisa menggunakan keahlian dan ketrampilannya untuk bekerja ataupun mendirikan usaha sendiri. Sayangnya, saat ini pemerintah masih mempertahankan eksistensi SMA-SMA sehingga yang terjadi adalah munculnya ledakan pengangguran setiap musim kelulusan sekolah yang dari waktu ke waktu semakin membengkak. Sebab lulusan SMA memang tidak dipersiapkan untuk kerja tapi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu beralih fungsinya beberapa SMA menjadi SMK di berbagai daerah harus kita sambut secara positif demi efektifitas dan peningkatan kualitas pendidikan. Semoga alih fungsi ini bisa diikuti oleh SMA-SMA lain yang kurang efektif dalam pembelajarannya sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Sedang untuk membuat standar minimal pendidikan dapat dilakukan seperti berikut. Misalnya, tingkat partisipasi wajib belajar 9 tahun secara teori harus 100 persen. Bagi daerah yang belum bisa mencapai angka tersebut harus dipacu ke arah itu dengan mematok standar minimal misalnya 85 persen. Patokan standar minimal ini harus dibarengi dengan aturan-aturan yang mengarah pada pencapaian angka minimal tersebut. Misalnya jika ada orangtua yang tidak mau menyekolahkan anaknya karena menganggap tidak ada manfaatnya karena lulusan SD dan SLTP dihargai sama di pasar kerja, maka orangtua tersebut harus mendapatkan sanksi. Pertanyaannya, bagaimana jika orangtua tidak mampu menyekolahkan anak tersebut karena faktor biaya? Apakah pemerintah akan memberikan beasiswa karena kenyataannya wajib belajar 9 tahun tidak gratis meski oleh pemerintah dikatakan gratis?

Inilah permasalahan kita saat ini. Memang seperti yang dijanjikan pemerintah bahwa untuk pendidikan dialokasikan dana 20 persen dari RAPBN, namun kenyataannya baru 4 persen yang terwujud. Ini menunjukkan kekurangseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam menangani kasus-kasus pendidikan Akibatnya, di lapangan para pengelola pendidikan berkreasi mencari tambahan dana melalui orangtua murid. Sehingga yang terjadi pendidikan menjadi semakin mahal. Akibat selanjutnya adalah banyaknya anak-anak putus sekolah karena tidak mampu membayar pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada membengkaknya pengangguran.

Oleh karena itu permasalahan seperti ini tidak boleh terjadi, sebab kalau sampai terjadi pada dunia pendidikan kita, maka akan mengganggu proses pendidikan dan pembelajaran serta mereduksi perkembangan anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak yaitu munculnya generasi yang hilang (*lost generation*) akan segera menjadi kenyataan. Kalau ini sampai terjadi maka hilangnya karakter bangsa kita pelan-pelan.

Untuk menyikapi masalah-masalah seperti di atas, maka strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah *pertama* merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen APBN. Memang dari segi keuangan negara rasa-rasanya tidak mencukupi. Tapi hal ini bisa dilakukan. Caranya dengan efisiensi anggaran pada bidang lain seperti pengurangan pembangunan fisik dan ekonomi. Sebab selama ini kita terlalu membanggakan pembangunan fisik dan ekonomi, sebab hasilnya akan segera tampak dan amat menguntungkan untuk tujuan politis. Sementara pembangunan pendidikan baru akan dirasakan satu generasi ke depan.

Kedua, mendorong masyarakat untuk bersama-sama membiayai pendidikan. Memang saat ini sudah ada sejumlah masyarakat yang melakukan pemberian beasiswa kepada anak-anak atau pelajar kita yang kurang mampu, baik atas nama pribadi maupun kelompok/golongan. Tapi hal itu masih sangat terbatas dan belum menjadi gerakan kita bersama. Oleh karena itu tugas pemerintah adalah menjadikan kebiasaan membantu anak-anak kurang mampu dalam hal pendidikan menjadi gerakan bersama. Kalau perlu dibuat UU untuk bantuan pendidikan. Tentunya harus ada batas minimal kapan seseorang atau kelompok berkewajiban membantu pendidikan anak-anak kurang mampu.

Ketiga, memberikan insentif berupa keringanan pajak atau insentif lain bagi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangun pendidikan kita. Dengan cara-cara ini diharapkan akan diperoleh hasil pendidikan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan merata.

Malang, 6 Juni 2005
Penulis

Drs R Wakhid Akhdinirwanto, MSi.

Penulis: dosen Fisika FMIPA UM
Alamat: Jl Gombang Malang 65145

Keterangan:

Dimuat Majalah WARTA GURU Penerbit Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Volume
IX, No 6 Desember 2005